

7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan merupakan kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto PP No. 17 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Pembagian Urusan Pemerintahan; Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Urusan Pemerintahan:

1. Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Ketengakerjaan meliputi 4 Sub bidang dan 1 penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yaitu:
 - a) Perencanaan Tenaga Kerja (ada 1 substansi)
 - b) Pelatihan Kerja dan Produktivitas (ada 3 Substansi)
 - c) Penempatan Tenaga Kerja (ada 4 Substansi)
 - d) Hubungan Industrial (ada 2 Substansi)
 - e) Sekretariat (ada 6 Substansi)
2. Urusan Pilihan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Sukabumi jo PERBUP Sukabumi No. 103 Tahun 2018 tentang SOTK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, memiliki Tupoksi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi melakukan Pemetaan dan Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RPJMD dan RENSTRA sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020.

Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan yang tercantum dalam DPA 910/21/DPA/1.07.3.32.0.00.01/2021 tanggal 04 Januari 2021, sesuai dengan hasil pemetaan Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Pemutakhiran sesuai Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020, yaitu didukung oleh 6 Program Wajib Non Pelayanan Dasar (5 Program Urusan Ketenagakerjaan dan 2 Program Urusan Transmigrasi) dan 1 Program Penunjang; 17 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Dengan jumlah pagu anggaran murni Rp. 16.397.976.163,00, pada Bulan Agustus 2021 mengalami *Refocussing* Anggaran menjadi Rp. 14.647.977.540,00 (terjadi penurunan anggaran sebesar Rp. 1.749.998.623,00), lalu pada Bulan November 2021 terjadi kembali perubahan anggaran menjadi Rp. 14.921.923.010,00 (terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 273.945.470,00) dengan Realisasi Anggaran sampai dengan Bulan Desember sebesar Rp. 14.837.850.865,00 atau 99,44 % terhadap pagu anggaran setelah perubahan. Berikut diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021.

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 464.492.500,00 setelah refocusing dan perubahan Rp. 424.450.500,00, terealisasi sebesar Rp 411.262.000,00 atau 96,89 %. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, dengan Alokasi anggaran Rp. 464.492.500,00 setelah refocusing dan perubahan Rp. 424.450.500,00, terealisasi sebesar Rp 411.262.000,00 atau 96,89 %. Dengan sub kegiatan yaitu :

1.1.1 Penyusunan rencana tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp. 464.492.500,00 setelah *refocusing* dan perubahan menjadi Rp. 424.450.500,00, terealisasi sebesar Rp. 411.262.000,00 atau 96,89 %. Dengan keluaran sub kegiatan yaitu :

- a. Pembuatan 1 unit Aplikasi *Silent Center (Sukabumi Integrated Labour and Employment Center / Pusat Layanan Ketenagakerjaan Sukabumi Yang Terintegrasi)*. *Launching* Aplikasi *Silent Center* dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021.
- b. Jumlah dokumen RTK mikro sebanyak 1 dokumen

Capaian indikator program ini adalah sebagai berikut :

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Indikator Kinerja Tahun | | Capaian % |
|----|--|------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7-12 | 9,51 | 79,25 |

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja, dimana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan *supply driven* diarahkan menjadi *demand driven*. Sasaran program adalah terpenuhinya keterampilan tenaga kerja untuk mengisi jenis pekerjaan yang berdaya saing tinggi. Anggaran belanja langsung yang disediakan untuk membiayai program ini, yaitu dengan alokasi anggaran Rp. 772.093.320,00. Pada bulan Agustus 2021 terjadi *Refocussing* dan perubahan sebesar Rp. 694.850.180,00. Lalu pada bulan November Kembali terjadi *Refocussing* sebesar Rp. 656.484.980,00. Hingga bulan November 2021 anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 655.436.480,00 atau 99,84 %. Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan sebagai berikut:

2.1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan alokasi anggaran Rp. 513.158.200,00, setelah *refocusing* dan *perubahan* menjadi Rp. 512.858.200,00 (*refocusing* Rp. 700.000,00) terealisasi sebesar 512.254.700,00 atau 99,82 %.

Dengan sub kegiatan yaitu :

- 2.1.1 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dengan alokasi anggaran Rp. 513.158.250,00, setelah *refocusing* dan perubahan menjadi Rp. 512.858.200,00 teralisasi sebesar Rp. 512.254.700,00 atau 99,82 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta pelatihan bidang keahlian las industri SMAW institusional sebanyak 16 orang.
 - b. Jumlah peserta pelatihan bidang keahlian menjahit institusional sebanyak 16 orang.
 - c. Jumlah peserta pelatihan bidang keahlian teknik manufaktur institusional sebanyak 16 orang.
 - d. Jumlah peserta pelatihan bidang keahlian instalasi penerangan institusional sebanyak 16 orang.
 - e. Jumlah peserta pelatihan bidang keahlian perakitan komputer institusional sebanyak 16 orang.

2.2. Pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan swasta yang memiliki kompetensi dengan alokasi anggaran Rp. 39.666.540,00, setelah *refocussing* dan perubahan menjadi Rp. 34.744.540,00 (*refocussing* Rp. 4.922.000,00), terealisasi sebesar 34.513.040,00 atau 99,33 %. Dengan sub kegiatan yaitu :

2.2.1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan alokasi anggaran Rp. 39.666.540,00, setelah *refocusing* dan perubahan menjadi Rp. 34.744.540,00. Terealisasi sebesar Rp 34.513.040,00 atau 99,33 %, dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah pelatihan bimtek tata kelola izin operasional LPK swasta / BLK komunitas sebanyak 25 orang.

2.3. Pelaksanaan pengukuran produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 219,268,580,00, setelah *refocussing* pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 146,947,440,00. Lalu pada bulan November terjadi perubahan menjadi Rp. 108.882.240,00, terealisasi sebesar 108.668.740,00 atau 99,80 %. Dengan sub kegiatan yaitu :

2.3.1 Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan alokasi anggaran Rp. 219.268.580,00 setelah *refocusing* menjadi Rp. 108.882.240,00, terealisasi sebesar Rp. 108.668.740,00 atau 99,80 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

a. Jumlah alumni pelatihan sebanyak 0 Orang, karena mengalami *refocusing*.

b. Jumlah perusahaan yang dibina untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui penghargaan sidhakarya / paramakarya sebanyak 2 perusahaan.

c. Jumlah peserta rakor kepala desa sebanyak 25 orang

Adapun pencapaian program dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Sasaran | Indikator | Satuan | Target | Realisasi | % |
|----|--|--|--------|--------|-----------|-----|
| 1. | Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja | Jumlah Pencari Kerja Dan Memiliki Kompetensi | % | 100 | 100 | 100 |

Permasalahan

- Adanya Pandemi Covid 19 memberikan efek yang luar biasa terhadap target dan capaian dalam Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Institusional tidak dapat dilaksanakan karena adanya pandemi sehingga capaian target nol, Adapun untuk pelaksanaan Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Institusional dapat dilaksanakan setelah adanya izin dari Satgas Covid.
- Kegiatan untuk Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja belum bisa dilaksanakan secara maksimal untuk ke perusahaan besar, Adapun untuk ke perusahaan kecil sudah dapat dilaksanakan dengan dibuktikan diperolehnya Penghargaan Shidakarya untuk UMKM di Kabupaten Sukabumi dari Propinsi Jawa Barat.
- Pada masa pandemi antusias masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi sangat besar data tahun 2021 yang mendaftar 528 orang. Akan tetapi paket pelaksanaan pelatihan hanya untuk 80 peserta pelatihan saja.
- Keterbatasan Sarana Prasarana.

Solusi

- *Refocussing* realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19
- Melaksanakan pembinaan ke perusahaan supaya melaksanakan program peningkatan produktivitas tenaga kerja.

- Diharapkan ada dukungan pendanaan sistem pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi mengingat antusias masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan sangat besar.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.508.884.920,00, pada bulan Agustus 2021 terjadi *Refocussing* anggaran menjadi Rp. 2.130.416.500,00. Lalu pada bulan November terjadi perubahan anggaran menjadi Rp. 2.016.722.700,00, dengan realisasi sebesar Rp 2.003.260.500,00 atau 99,33 %. Program tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 Sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

- 3.1 Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran Rp. 1.483.230.400,00, setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 1.450.912.900,00, dengan realisasi anggaran Rp. 1.440.065.700,00 atau 98,70 %. Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, yaitu:
 - 3.1.1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja, dengan alokasi anggaran Rp.10.938.000,00, mengalami *refocussing* anggaran menjadi Rp. 0 dan realisasi sampai dengan bulan ini Rp. 0,00.
 - 3.1.2 Perluasan Kesempatan Kerja, dengan alokasi anggaran Rp. 1.472.292.400,00, setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 1.450.912.900,00, dengan realisasi anggaran Rp. 1.440.065.700,00 atau 98,70 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah tenaga kerja pekerasan jalan sebanyak 325 orang.
 - b. Jumlah tenaga kerja rabat beton sebanyak 264 orang.
- 3.2 Kegiatan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Rp. 978.090.520,00, setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 513.251.300,00, dengan realisasi anggaran Rp. 475.555.800,00 atau 71,99 %. Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan, yaitu:
 - 3.2.1 Peningkatan perlindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI), dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,00, dengan realisasi anggaran Rp. 687.000,00 atau 4,58 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah TKI Bermasalah 8 Orang
 - 3.2.2 Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran, dengan alokasi anggaran Rp. 228.540.400,00, setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 118.750.000,00, dengan realisasi anggaran Rp. 112.650.500,00 atau 94,86 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Hibah Rp. 50.000.000,00.
 2. Peserta Diseminasi 100 Orang.
 3. Peserta Rakor P3MI 30 Orang.
 - 3.2.3 Pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan, dengan alokasi anggaran Rp. 734.550.120,00, setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 429.501.300,00, dengan realisasi anggaran Rp. 428.863.300,00 atau 99,85 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 1. Jumlah peserta pembekalan wirausaha bengkel las sebanyak 20 orang.
 2. Jumlah peserta pembekalan wirausah menjahit sebanyak 40 orang.
 3. Jumlah peserta pembekalan wirausaha pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 orang.
- 3.3 Kegiatan penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Rp. 47.564.000,00, setelah *refocussing* anggaran menjadi Rp. 2.558.500,00, dengan realisasi anggaran Rp. 2.558.500,00 atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, kegiatan ini terdiri 1 sub kegiatan, yaitu :
 - 3.3.1 Koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 47.564.000,00, setelah *refocusing* menjadi Rp. 2.558.500,00. Dengan realisasi anggaran Rp. 2.558.500,00 atau 100 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah perusahaan pengguna tenaga kerja asing 50 Perusahaan.

Capaian kinerja program ini adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Indikator Kinerja Tahun | | Capaian % |
|----|--|------------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | |
| 1. | Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Produktivitas Pekerja Dan Serta Melindungi Hak Hak Pekerja | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | % | 67 | 64,93 | 99,89 |
| | | Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 7-12 | 9,51 | 79,25 |

Dari table diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelayanan Kartu Pencari Kerja (AK. I) kepada masyarakat Pencari Kerja pada tahun 2021 sebanyak 27.163 orang terdiri dari 12.555 laki-laki dan 14.608 perempuan.
- Pada tahun 2020 Pencari kerja yang telah di tempatkan di berbagai perusahaan sebanyak 6.600 Orang terdiri dari 266 laki-laki dan 6.334 perempuan.
- Penempatan kerja ke luar negeri yang telah teregistrasi di SISKOTKLN di fasilitasi oleh Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebanyak 161 orang terdiri dari 57 laki-laki dan 104 perempuan.
- Pelayanan Pemulangan TKI bermasalah dan pengaduan kasus PMI yang di tangani oleh LTSA sebanyak 20 kasus.
- Pelayanan pemberian Laporan Keberadaan TKA sebanyak 423 orang Laporan Keberadaan TKA diberikan kepada TKA berdasarkan Ijin yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Pelayanan pemberian Validasi Pembayaran Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing sebanyak 138 orang.
- Realisasi PAD dari Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai berikut :

| Target | Realisasi | Presentase | Keterangan |
|----------------|---------------------------------|------------|---|
| Rp. 2,7 Milyar | Rp.2.356.982.540,- (138 TKA) | 87,25 % | Target tida tercapai dikarenakan pembayaran retribusi dihentikan s.d tanggal 27 Oktober 2021, disebabkan pemda belum mempunyai penyesuaian perda tentang retribusi penggunaan TKA sesuai surat edaran dari kemenaker RI Nomor M/8/HK.04/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021. |

Permasalahan

- Untuk Retribusi Perpanjangan IMTA target tidak tercapai disebabkan Pemerintah Kabupaten Sukabumi belum mempunyai Perda Penggunaan TKA penyesuaian dari Perda Retribusi Perpanjangan IMTA sesuai instruksi surat edaran dari Kemnaker RI dan Kemendagri RI. Sehingga pembayaran sisa Retribusi dialihkan ke pusat/Kemnaker RI sejak tanggal 28 Oktober 2021.
- Penyerapan / penempatan tenaga kerja tidak banyak / tidak mencapai target dikarenakan banyak perusahaan yang tidak menerima karyawan baru dan masih terdampak oleh *Covid-19*.
- Banyak perusahaan menerima karyawan yang berpengalaman sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
- Anggaran yang sangat minim sehingga pemberdayaan masyarakat tidak merata.
- Angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja.
- Adanya kebijakan *refocussing*.
- Sumber daya manusia terbatas.

Solusi

- Membuat Perda tentang Retribusi Penggunaan TKA pada Tahun 2022.
- Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan.
- Memaksimalkan anggaran yang ada.
- Memberikan informasi tentang pelatihan kompetensi dan kewirausahaan.
- Mengajukan anggaran perubahan.
- Memberdayakan potensi personil yang ada.

Dampak

- Menekan angka pengangguran.
- Dapat menyerap tenaga kerja penganggur, masyarakat miskin, korban PHK, purna PMI, calon PMI dan buruh tani.
- Meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak pandemi *Covid-19*.

4) Pengesahan Peraturan Perusahaan & Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 22.430.000,00, setelah mengalami *refocussing* anggaran menjadi Rp. 19.245.250,00. Realisasi anggaran sebesar Rp 19.245.250,00 atau 100 %. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 1 Sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

4.1 Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp.22.430.000,00, mengalami *refocussing* dan perubahan anggaran menjadi 19.245.250,00. Realisasi sebesar Rp 19.245.250,00 atau 100 %. Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, yaitu :

4.1.1 Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan dengan alokasi anggaran Rp. 22.430.000,00, setelah *refocusing* menjadi Rp. 19.245.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 19.245.250,00 atau 100 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah perusahaan yang mengesahkan peraturan perusahaan sebanyak 25 perusahaan.

5) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 546.000.000,00, setelah mengalami *refocussing* dan perubahan sebesar Rp. 323.261.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 323.353.000,00 atau 99,92 %. Program tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

5.1 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 346.000.000,00, setelah *refocussing* dan perubahan sebesar Rp. 236.444.000,00. Realisasi sebesar Rp. 236.229.000,00 atau 99,91 %. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

5.1.1 Pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 346.000.000,00, setelah *refocusing* menjadi Rp. 236.444.000,00. Realisasi sebesar 236.229.000,00 atau 99,91 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Jumlah pencegahan kasus hubungan industrial sebanyak 24 kasus.
- b. Jumlah peserta rapat dewan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan pengkajian kemampuan perusahaan sebanyak 41 orang.
- c. Jumlah peserta pemilihan pekerja teladan 50 orang.
- d. Jumlah peserta pemilihan perusahaan terbaik pembina pekerja perempuan 50 Perusahaan.
- e. Jumlah peserta rapat persiapan hari buruh nasional, peserta rapat evaluasi hari buruh nasional, peserta forum group discussion (FGD) sebanyak 200 orang.

- 5.1.2 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00, setelah mengalami *refocussing* dan perubahan anggaran menjadi Rp. 35.397.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 35.344.000,00 atau 99,85 %. Dengan keluaran sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Jumlah penyelesaian kasus hubungan industrial sebanyak 65 kasus.
- 5.1.3 Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi dengan alokasi anggaran Rp. 50.000.000,00, setelah mengalami *refocussing* dan perubahan anggaran menjadi Rp. 0,00 Sehingga tidak ada keluaran sub kegiatan.
- 5.1.4 Pelaksanaan operasional Lembaga Kerjasama tirpartit daerah kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00, setelah mengalami *refocussing* dan perubahan menjadi Rp. 51.780.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 51.780.000,00 atau 100 %. Keluaran kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah fasilitasi LKS Tripartit sebanyak 28 orang.

Permasalahan

- Masih terdapat beberapa perusahaan yang teridentifikasi melakukan pelanggaran aturan ketenagakerjaan.
- Adanya klausul perjanjian yang terdapat dalam PKWT yang tidak dicantumkan dalam lembar PKWT.
- Kurangnya sumber daya manusia pada seksi syarat kerja sehingga menghambat kecepatan dalam melaksanakan tugas.
- Kurangnya anggaran sehingga berdampak pada kegiatan yang kurang maksimal dalam seksi syarat kerja.

Solusi

- Melakukan pembinaan ke perusahaan-perusahaan dan memberikan pengertian dan anjuran akan pentingnya kondusifitas kerja dengan meminimilasi pelanggaran ketenagakerjaan.
- Melakukan pembinaan, monitoring ke setiap perusahaan dan memberikan arahan kepada setiap perusahaan tentang klausul yang harus dimasukkan dalam PKWT.
- Mengusulkan adanya tenaga tambahan untuk seksi syarat kerja.
- Mengusulkan anggaran sesuai dengan kebutuhan agar lebih optimal.

6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.691.575.423,00, setelah mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 11.174.311.580,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 11.119.528.635 atau 99,51 %, program ini terdiri dari 6 kegiatan dan 22 sub kegiatan. Dengan uraian sebagai berikut :

- 6.1 Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 112.556.300,00, setelah mengalami *refocusing* menjadi sebesar Rp. 55.197.500,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 55.197.500,00 atau 100 %, kegiatan tersebut terdiri dari 7 sub kegiatan yaitu :
 - 6.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.637.300,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 12.878.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 12.878.000,00 atau 100 %, dengan keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah dokumen perencanaan sebanyak 3 dokumen.
 - 6.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.232.000,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 2.395.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 2.395.000,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah dokumen program dan kegiatan sebanyak 1 dokumen.

- 6.1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.232.000,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 0,00. Keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah dokumen program dan kegiatan perubahan sebanyak 1 dokumen.
- 6.1.4 Koordinasi penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.465.000,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 5.287.500,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 5.287.500,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah dokumen program dan kegiatan sebanyak 1 dokumen.
- 6.1.5 Koordinasi penyusunan DPA-SKPD perubahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.465.000,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 0,00. Keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah dokumen program dan kegiatan perubahan sebanyak 1 dokumen.
- 6.1.6 Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.075.000,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 20.111.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 20.111.000,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah laporan capaian kinerja sebanyak 1 dokumen.
- 6.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.450.000,00, setelah perubahan anggaran menjadi Rp. 14.526.000,00. Keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Urusan tenaga kerja dan urusan transmigrasi sebanyak 2 dokumen.
- 6.2 Administrasi keuangan perangkat daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.337.237.814,00, setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp. 8.860.179.271,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 8.774.552.267,00 atau 99,03 %. Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
 - 6.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan PNS dengan alokasi anggaran Rp. 9.251.383.814,00, setelah perubahan menjadi Rp. 8.797.742.771,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.774.552.267,00 atau 99,74 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Gaji dan tunjangan PNS selama 14 bulan.
 - 6.2.2 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD dengan alokasi anggaran Rp. 26.400.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 16.179.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 16.179.000,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan akuntansi sebanyak 12 Dokumen
 - 6.2.3 Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi anggaran Rp. 8.196.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 8.122.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.122.000,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen.
 - 6.2.4 Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan dengan alokasi Rp. 10.000.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 3.310.500,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.310.500,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan sebanyak 1 dokumen.
 - 6.2.5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulan/semesteran SKPD dengan alokasi Rp. 31.258.000,00, setelah perubahan Rp. 31.131.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 31.110.000,00 atau 99,93 %, keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran sebanyak 14 Dokumen.
 - 6.2.6 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dengan alokasi Rp. 10.000.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 3.694.000,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.694.000,00 atau 100 %, keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran sebanyak 1 dokumen.
- 6.3 Administrasi umum perangkat daerah dengan alokasi anggaran Rp. 475.424.809,00, setelah *refocusing* menjadi sebesar Rp. 521.751.309,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 517.322.144,00 atau 99,15 %, kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :

- 6.3.1 Penyediaan peralatan rumah tangga dengan alokasi Rp. 56.652.900,00, dengan realisasi sebesar Rp. 56.517.400,00 atau 99,76 %. Keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Tersedianya peralatan rumah tangga selama 12 bulan.
- 6.3.2 Penyediaan bahan logistik kantor dengan alokasi Rp. 143.187.209,00, setelah perubahan menjadi Rp. 198.248.709,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 197.087.044,00 atau 99,41 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah ATK yang dibeli sebanyak 100.
 - b. Tersedianya makanan dan minuman selama 12 bulan.
- 6.3.3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi Rp. 149.964.700,00, setelah perubahan menjadi Rp. 144.164.700,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 141.213.750,00 atau 97,95 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Fasilitasi barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.
- 6.3.4 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi Rp. 125.620.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 122.685.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 122.503.950,00 atau 99,85 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi selama 11 bulan.
- 6.4 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.876.100,00, setelah *refocusing* menjadi Rp. 224.764.700,00. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 224.550.600,00 atau 99,90 %, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
 - 6.4.1 Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi Rp. 199.876.100,00, setelah perubahan menjadi Rp. 224.764.700,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 224.550.600,00 atau 99,90 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli sebanyak 23 unit.
- 6.5 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.058.820.400,00, setelah *refocusing* menjadi Rp. 1.063.758.800,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.045.519.266,00 atau 98,29 %, kegiatan tersebut terdiri dari 2 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
 - 6.5.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan alokasi Rp. 162.000.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 147.000.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 141.076.422,00 atau 95,97 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terpenuhi selama 12 bulan.
 - 6.5.2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan alokasi Rp. 896.820.400,00, setelah perubahan menjadi Rp. 916.758.800,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 904.442.844,00 atau 98,66 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jasa keamanan kantor terpenuhi selama 13 bulan.
 - b. Jasa kebersihan kantor terpenuhi selama 13 bulan.
 - c. Jasa surat menyurat terpenuhi selama 13 bulan.
 - d. Jasa tenaga supir terpenuhi selama 13 bulan.
- 6.6 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 506.660.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 448.600.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 439.971.358,00 atau 98,06 %, kegiatan tersebut terdiri dari 2 sub kegiatan diantaranya sebagai berikut :
 - 6.6.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi Rp. 291.000.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 245.350.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 241.862.208,00 atau 98,58 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah kendaraan yang dipelihara sebanyak 6 unit.
 - 6.6.2 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan alokasi Rp. 216.560.000,00, setelah perubahan menjadi Rp. 203.310.000,00. Dengan realisasi sebesar Rp. 198.109.150,00 atau 97,44 %, keluaran sub kegiatan tersebut yaitu :
 - a. Jumlah kendaraan yang dipelihara sebanyak 25 unit.

Urusan Transmigrasi

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui 1 program yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja, yaitu Program Pengembangan Wilayah Ketransmigrasian. Isu Strategis dari program ini adalah tingkat penyebaran penduduk yang belum merata, rendahnya pendapatan masyarakat pelaku sektor pertanian dan rendahnya kepemilikan lahan pertanian. Latar belakang program ini adalah bahwa minat masyarakat untuk bertransmigrasi masih tinggi serta banyaknya buruh tani dan petani gurem kecil di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari program ini adalah mewujudkan masyarakat transmigrasi yang berkualitas. Sasarannya adalah meningkatnya animo masyarakat dalam pengembangan kawasan transmigrasi Lokal dan luar Pulau Jawa. Sedangkan indikator program ini adalah jumlah transmigran yang diberangkatkan pada tahun berjalan dan jumlah KK transmigran yang dibina. Anggaran yang disediakan untuk membiayai program ini sebesar Rp. 392.500.000,00, setelah **refocussing** anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.307.087.000,00, terealisasi sebesar Rp.305.765.000,00 atau 99,57 %. Urusan Transmigrasi tersebut dilaksanakan melalui 2 program dan 2 kegiatan serta didukung dengan 5 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 380.000.000,00, setelah mengalami **refocussing** dan perubahan anggaran menjadi Rp. 305.307.000,00. Realisasi anggaran sebesar 303.985.000,00 atau 99,57 %, dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yaitu :

- 1.1 Kegiatan Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.380.000.000,00, mengalami **refocussing** anggaran menjadi Rp.305.307.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 303.985.000,00 atau 99,57 %, kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu ;
 - 1.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00, mengalami **refocusing** menjadi Rp. 0,00.
 - 1.1.2 Penyiapan lingkungan hunian fisik, social, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,00, mengalami **refocusing** menjadi Rp. 0,00.
 - 1.1.3 Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 27.500.000,00, mengalami **refocusing** menjadi Rp. 712.000,00. Realisasi sebesar Rp. 712.000,00, dengan keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah KK yang ditempatkan awalnya 5 KK, dikarenakan masih adanya pandemi Covid- 19 sehingga yang ditempatkan menjadi 0 KK.
 - 1.1.4 Penyuluhan transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 307.500.000,00, mengalami **refocusing** menjadi Rp. 304.595.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 303.273.000,00 atau 99,57 %, dengan keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah masyarakat transmigran lokal yang terbina sebanyak 5 lokasi, yang terdiri dari Lengkon-Langkapjaya, Ciemas-Girimukti, Sagaranten-Curugluhur, Sagaranten-Mekarsari, Cidolog-Cikarang.

2) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.500.000,00, setelah mengalami **refocussing** dan perubahan anggaran menjadi Rp. 1.780.000,00. Realisasi anggaran sebesar 1.780.000,00 atau 100,00 %, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yaitu :

- 2.1 Kegiatan pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian dengan anggaran sebesar 12.500.000,00, mengalami **refocusing** menjadi Rp. 1.780.000,00. Terealisasi sebesar Rp. 1.780.000,00 atau 100,00 %, kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu :
 - 2.1.1 Penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam rangka kemandirian satuan pemukiman dengan anggaran sebesar Rp. 12.500.000,00, setelah mengalami **refocusing** menjadi Rp. 1.780.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.780.000,00 atau 100 %, dengan keluaran sub kegiatan yaitu :
 - a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sebanyak 30 orang.

Adapun Capaian kinerja program dapat dilihat pada tabel berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------|--------|-----------|-----|
| Meningkatnya Jumlah Transmigran Yang diberangkatkan dan Terbinanya Transmigran dan Translok | Jumlah KK Transmigran Yang Diberangkatkan Pada Tahun Berjalan | KK | 25 KK | - | - |
| | Jumlah KK Transmigran Yang Dibina | KK | 30 KK | 30 | 100 |

Dari tabel di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Sesuai surat menteri keuangan RI Nomor:S-629/MK.02/2021 tanggal 20 juli 2021 perihal **refocusing** dan realokasi belanja Kementerian/Lembaga T.A 2021 sesuai dengan surat dari Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan transmigrasi Nomor.593/PKT.04.01/VII/2021 tanggal 26 juli 2021 perihal *revisi* alokasi penempatan transmigran 2021. Pada tahun 2021 Kabupaten Sukabumi, memiliki alokasi penempatan transmigran ke luar pulau jawa barat sebanyak 5 (lima) KK, sehubungan dengan terjadinya pandemi maka alokasi tersebut dibatalkan. Sejalan dengan pemangkasan anggaran di tingkat pusat, sehingga pada tahun ini tidak ada pemberangkatan transmigran lintas pulau jawa.
2. Kabupaten Sukabumi, memiliki transmigrasi lokal (*Resettlement*) terbanyak se-Jawa Barat diantara 11 (sebelas) Kabupaten yang menerima *eksodan*. Kabupaten Sukabumi pada tahun 2021 ada 30 KK yang dibina dari 1.088 KK yang tersebar di 5 (lima) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) hingga saat ini pembinaan transmigran terus dilakukan dengan dukungan APBD II hasil yang dicapai saat ini meningkatkan kesejahteraan warga *translok* serta beragamnya mata pencaharian yang mereka miliki, mereka telah mampu menjual produk pertaniannya.

Permasalahan

- Minat/animo masyarakat untuk bertransmigrasi di Kabupaten Sukabumi hingga saat ini tinggi hanya tidak didukung anggaran yang memadai, serta alokasi sangat terbatas.
- Warga transmigrasi di 5 (lima) Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) belum memiliki legalitas, baik Lahan Pekarangan (LP) maupaun Lahan Usaha (LU).

Solusi

- Mengusulkan ke pemerintah pusat agar alokasi anggaran ditambahkan, sehingga transmigrasi ke luar pulau jawa berjalan kembali.
- Mengusulkan penambahan anggaran pendukung dari APBD II.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan instansi terkait, diantaranya : Dinas Pertanahan & tata ruang Kabupaten Sukabumi, BAPENDA Kabupaten Sukabumi, kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi , Disnakertrans Provinsi Jawa Barat dan Kanwil ATR/ BPN Provinsi Jawa Barat.

Dampak

- Dengan masih di bukanya kesempatan untuk memberangkatkan transmigrasi ke luar pulau jawa, masyarakat berharap bisa mendapatkan kesempatan bertransmigrasi.
- Di warga transmigrasi adanya pertumbuhan ekonomi lokal yang memadai, sehingga potensi tersebut di lanjutkan untuk fasilitas penduduk dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal.

Tindak lanjut atas Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2019

Dalam Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Sukabumi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi akhir Tahun 2020 terdapat beberapa catatan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Disnakertrans, sebagai berikut :

- Tidak realisasinya anggaran pada beberapa kegiatan dalam program perluasan dan pengembangan perluasan kerja yang hanya diberikan pagu anggaran Rp. 1.500.000 untuk kegiatan bursa kerja khusus (BKK) sehingga kegiatan ini hanya sampai pada tahap persiapan awal, sama halnya dengan kegiatan pembinaan perusahaan pengguna tenaga kerja yang hanya diberikan anggaran sebesar Rp. 1.353.000.
- Adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang telah ditempatkan pada perusahaan di tahun 2020, dimana jumlah tenaga kerja laki-laki sebanyak 122 orang sedangkan perempuan sebanyak 4.342 orang, maka dari itu disnakertrans dan pemerintah daerah harus dapat menyelesaikan permasalahan tenaga kerja dengan menyeimbangkan proporsi tenaga kerja laki-laki dan perempuan.
- Masih adanya masalah di masyarakat terhadap para pencari kerja yang menggunakan jasa calo dengan jaminan dapat diterima di perusahaan, hal tersebut perlu ditertibkan.
- Bertambahnya pengangguran di setiap kecamatan yang diakibatkan dari dampak *Covid-19* sehingga tidak sedikit perusahaan yang memberhentikan dan mem PHK para karyawan nya, hal ini menjadi permasalahan baru di masyarakat, dan Disnakertrans perlu melakukan antisipasi atas kondisi tersebut.
- Program padat karya, pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan pengembangan teknologi tepat guna perlu mendapat perhatian, karena salah satu solusi untuk mengatasi pengangguran.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi telah menindaklanjuti nya di tahun 2021 dan berikut penjelasan nya :

- Untuk kegiatan dalam program perluasan dan pengembangan perluasan kerja serta kegiatan pembinaan perusahaan pengguna tenaga kerja kenapa tidak realistis anggarannya, dikarenakan ada refocussing anggaran pada masa *pandemic Covid-19*. Sehingga untuk kegiatan tersebut hanya baru sampai tahap koordinasi.
- Untuk ketimpangan antara jumlah tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang ditempatkan di perusahaan tahun 2020 dimana tenaga kerja laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan tenaga kerja perempuan, itu dikarenakan karena lowongan kerja yang disediakan oleh perusahaan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja perempuan. Untuk menanggulangi hal tersebut harus ada dukungan *stakeholder* terkait dan semua pihak, baik eksekutif dan legislatif dalam mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung masuknya jenis investasi baru yang dapat menyerap tenaga kerja laki-laki lebih banyak lagi.
- Untuk masalah jasa calo yang masih terjadi di masyarakat dalam mencari pekerjaan, itu harus ada peran dari semua pihak, mulai dari *stakeholder* serta baik eksekutif maupun legislatif dan juga harus ada pengawasan dari para penegak hukum. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sudah melakukan upaya dengan cara dibuatkan nya Silent Center. Dimana di dalam Silent Center tersebut cukup lengkap sebagai wadah mengenai hal ketenagakerjaan, tapi sayangnya dari *stakeholder* sendiri tidak bisa memanfaatkan Silent Center tersebut. Sehingga jasa calo itu sendiri pun masih tetap ada.
- Untuk menanggulangi bertambahnya pengangguran di setiap kecamatan yang disebabkan karena *pandemic Covid-19* sehingga banyaknya tenaga kerja yang diberhentikan / di PHK yaitu, dengan menambahkan program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja serta program padat karya, sehingga yang terkena PHK maupun para pencari kerja bisa mendapatkan penghasilan serta meningkatnya *life skill* mereka.
- Untuk program padat karya, pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan pengembangan teknologi tepat guna harus terus tetap dijalankan. Untuk memaksimalkan program kegiatan tersebut harus adanya anggaran yang lebih besar lagi sehingga pemberdayaan masyarakat bisa merata. Program kegiatan tersebut sangat efektif untuk menekan angka pengangguran dengan menyerap tenaga kerja penganggur, masyarakat miskin, korban PHK, purna PMI, keluarga PMI, calon PMI dan buruh tani. Sehingga bisa meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak *pandemic Covid-19*.